

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka reregulasi dan deregulasi peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi hukum, perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Analisis dan Evaluasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 687);
4. Pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.01.03-07 tentang Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Tim Analisis dan Evaluasi Hukum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi Hukum sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU terdiri atas Penanggung Jawab dan Anggota Tim Analisis dan Evaluasi Hukum yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Tim Analisis dan Evaluasi Hukum bertanggung jawab terhadap analisis dan evaluasi hukum.
2. Anggota Tim Analisis dan Evaluasi Hukum bertugas melakukan kegiatan:
  - a. penyusunan daftar program kerangka regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2020-2024, berdasarkan usulan Unit Organisasi LKPP;
  - b. analisis dan evaluasi kerangka regulasi LKPP Tahun 2022;
  - c. analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum LKPP Tahun 2022; dan
  - d. analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum LKPP Tahun 2022.

KETIGA : Tim Analisis dan Evaluasi Hukum bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 81 Tahun 2022 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2023

Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 Februari 2023

**TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

<b>No</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama/ Jabatan</b>
1.	Penanggung Jawab	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
2.	Ketua Tim	Rinaldi Morintosh
2.	Anggota	1. Rasmita Juliana Sitepu 2. Ardian Hoppin Sitompul 3. Benny Leopold Dumais 4. Asih Riska Nurmasari 5. Cherish Shery Desarya 6. Yogie Prastiyans 7. Mahatmya Widyasri 8. Stephanus Karmel Nugraha Kopong Miten

Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA